

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini Kinerja instansi pemerintah semakin disorot karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas juga mengkritik untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik terhadap lembaga-lembaga sektor publik demi mencapai pembangunan yang baik terhadap daerahnya.

Revisi UU No.22 Tahun 1999 ke UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 ke UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Karena masing-masing daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah. (Sartika 2018)

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang

direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (*realisasi terkini*) yang dicapai.

APBD dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan untuk optimalisasi anggaran. Dalam hal ini kesemua aspek dari struktur otonomi daerah yang harus disusun harus berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value formoney*).

Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan atau bentuk lainnya dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat.

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pemerintah pusat memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat dan melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Merupakan lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu tugas yang dilakukan oleh Bapelitbangda adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan, salah satunya terkait dengan pengelolaan anggaran. Bapelitbangda Provinsi NNT telah berusaha menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan perkembangan dalam penyusunan anggaran namun tidak dengan mengabaikan pengukuran kinerja anggaran baik secara mikro maupun makro serta pengukuran kinerja anggaran.

Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efektif atau tidak dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan tata laksana kegiatan instansi selama satu tahun anggaran tersebut. Dengan alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada uraian yang mendukung analisis kinerja anggaran belanja. Untuk mengetahui besarnya selisih anggaran belanja dengan realisasinya dapat dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase berdasarkan Laporan Realisasi anggaran (LRA) yang disajikan menunjukkan

sejauh mana efektifitasnya dan pelaksanaan anggaran kegiatan instansi selama satu tahun anggaran itu..

Pertumbuhan belanja merupakan gambaran tingkat pertumbuhan jumlah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertumbuhan belanja ini dapat diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan belanja. Rasio pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Pertumbuhan belanja pada umumnya cenderung mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap tingkat inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja dapat dikatakan positif apabila pertumbuhan belanja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan pertumbuhan belanja dapat dikatakan negatif apabila pertumbuhan belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Walaupun pertumbuhan anggaran dapat dikatakan positif apabila pertumbuhan belanja mengalami kenaikan, pemerintah tetap harus melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran. Penghematan dalam penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat diukur dengan menggunakan rasio efisiensi anggaran. Rasio efisiensi anggaran menggambarkan seberapa besar tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penggunaan anggaran. Pengguna anggaran dapat dikatakan efisien apabila rasio efisiensinya kurang dari 100%. Jika rasio efisiensi mencapai 100%, maka pemerintah dapat dikatakan belum melakukan penghematan dalam penggunaan anggarannya.

Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019-2022.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Target Dan Realisasi Belanja**  
**Pada Bappelitbangda provinsi NTT**

	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>
<b>2019</b>	<b>Rp.26.025.237.000,00</b>	<b>Rp.24.792.969.043,00</b>	<b>Rp.1.232.267.957,00</b>
<b>2020</b>	<b>Rp.75.590.405.562,00</b>	<b>Rp.65.141.902.653,00</b>	<b>Rp.10.448.502.909,00</b>
<b>2021</b>	<b>Rp. 23.396,838.387,00</b>	<b>Rp.19.702.870.175,00</b>	<b>Rp. 3.693.968.212,00</b>
<b>2022</b>	<b>Rp.22.200.669.532,00</b>	<b>Rp.17.185.390.424,00</b>	<b>Rp. 5.015.279.108,00</b>

*SUMBER : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah*

Dari data diatas menunjukkan bahwa anggaran terealisasi belanja pada Bappelitbangda mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2020 anggaran dan realisasinya mengalami kenaikan yang begitu pesat. Laporan anggaran belanja pada Bappelitbangda yang sudah direncanakan, tetapi tidak terealisasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif, karena dalamnya masih ada program/ kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan sedikit yang terlaksanakan pada anggaran yang bersangkutan. Tidak terealisasinya anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, hal ini dapat menunjukkan ada beberapa kendala atau faktor mempengaruhi kinerja anggaran belanja pada Bappelitbangda, sehingga realisasi anggaran tidak dapat mencapai target yang direncanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran tersebut.

**Tabel 1.2**  
**Data Belanja Modal**  
**Pada Laporan Target Dan Realisasi Pada Bappelitbangda**

	Target	Realisasi	Selisih
<b>2019</b>	<b>Rp.1.256.119.000,00</b>	<b>Rp.1.178.276.850,00</b>	<b>Rp.77.842.150,00</b>
<b>2020</b>	<b>Rp.2.126.428.500,00</b>	<b>Rp.1.897.464.528,00</b>	<b>Rp.228.963.972,00</b>
<b>2021</b>	<b>Rp.442.632.328,00</b>	<b>Rp.289.884.928,00</b>	<b>Rp.152.747.400,00</b>
<b>2022</b>	<b>Rp.13.108.785,00</b>	<b>Rp 8.250.000,00</b>	<b>Rp.4.858.785,00</b>

*Sumber :Laporan Keuangan Bappelitbangda*

Dari data laporan keuangan tersebut, dapat dikatakan bahwa, anggaran Belanja modal pada Bappelitbangda Provinsi NTT dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan dan penurunan, Yang dimana anggaran belanja modal mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021 dan 2022, hal ini juga berpengaruh pada realisasi anggaran belanja modal yang ikut turun.

**Tabel 1.3**  
**Data Belanja Operasional**  
**Pada Laporan Target Realisasi Anggaran Pada Bappelitbangda**

	Target	Realisasi	Selisih
<b>2019</b>	<b>Rp.24.769.118.000,00</b>	<b>Rp.23.614.692.193,00</b>	<b>Rp.1.154.425.807,00</b>
<b>2020</b>	<b>Rp.73.463.977.062,00</b>	<b>Rp.63.244.438.125.,00</b>	<b>Rp.10.219.538.937,00</b>
<b>2021</b>	<b>Rp.22.954.206.059,00</b>	<b>Rp.19.412.985.247,00</b>	<b>Rp.3.541.220.812,00</b>
<b>2022</b>	<b>Rp.22.187.560.747,00</b>	<b>Rp.17.177.140.424,00</b>	<b>Rp.5.010.420.323,00</b>

*Sumber :Laporan Keuangan Bappelitbangda*

Dari data laporan keuangan tersebut, dapat dikatakan bahwa, anggaran belanja Operasional pada Bappelitbangda Provinsi NTT dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan dan penurunan, yang dimana anggaran pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Anggaran setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan hal ini juga berpengaruh pada realisasi anggaran yang ikut naik

dan turun. Anggaran belanja operasional pada Bappelitbangda Provinsi NTT yang sudah direncanakan, tetapi tidak realisasi sepenuhnya. Karena atas hal itu sebagai tugas dan fungsi dari dinas Bappelitbangda provinsi NTT tidak mengakomodir semua, dalam hal ini dinas hanya bisa mengerjakan sebagiannya. Dan dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat bahwa anggaran belum terserap sepenuhnya.

Mengingat pentingnya analisis terhadap anggaran belanja sebagai alat informasi dalam menilai kondisi keuangan yang telah diuraikan serta beberapa faktor yang menyebabkan terealisasinya anggaran suatu lembaga, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Kinerja Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja belanja berdasarkan analisis varians belanja?
2. Bagaimana kinerja belanja berdasarkan analisis pertumbuhan belanja?
3. Bagaimana kinerja belanja berdasarkan keserasian belanja?
4. Bagaimana kinerja belanja berdasarkan rasio efesiensi belanja?
5. Apa Faktor Penentu kinerja Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja belanja berdasarkan analisis varians belanja.
2. Untuk mengetahui kinerja belanja berdasarkan analisis pertumbuhan belanja.
3. Untuk mengetahui kinerja belanja berdasarkan keserasian belanja
4. Untuk mengetahui kinerja belanja berdasarkan rasio efisiensi belanja.
5. Untuk Mengetahui Faktor penentu Kinerja Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

### **1.4 Manfaat Penulis**

Bagi Penulis

1. Bagi penulis

Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai Analisis kinerja Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.

2. Bagi Instansi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan referensi dalam menganalisis kinerja belanja

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi penulis selanjutnya, khususnya mengenai analisis kinerja belanja